

Relasi Pendidikan Islam, Politik dan Kekuasaan

Annisa Tusadia, Qolbi Khoiri²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu
annisatusadia@gmail.com

Abstract

Discovering the connections between Islamic education, politics, and electricity is the goal of this essay. For analysis and conclusion, this research approach uses library or literature studies. The author employs literature observation to gather information, specifically research done using information related to the family members of Islamic education, politics and energy, the internet, books, and other pertinent resources. The results of this observation are: There is a strong connection between electricity politics and the realm of Islamic education. The seriousness with which the ulama and umara have listened to educational issues in order to support groups and their supporters' sociopolitical positions has left its mark on Islamic culture. It is undeniable that the rulers actively promote the advancement of Islamic education, and the rulers depend on the support of educational institutions to maintain their hold on power. Why is that? Because Islamic government's goal is to defend truth and justice, which cannot be accomplished without applying Shari'a.

Keywords: the relation of Islamic education and politics, the relation of politics and power, the relation of political education to power

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui relasi pendidikan Islam, politik, dan kekuasaan. Metode penelitian ini menggunakan literature research atau penelitian kepustakaan yang akan dianalisis dan disimpulkan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan studi pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan data-data yang berkaitan dengan relasi pendidikan Islam, politik, dan kekuasaan, internet, buku, dan sumber lainnya yang relevan. Hasil penelitian ini berupa: Di dunia pendidikan Islam, politik kekuasaan mempunyai keterkaitan dengan terlihat kentara. Sejarah peradaban Islam, banyak ditandai oleh kesungguhan para ulama serta umara dalam memperhatikan masalah Pendidikan, pada upaya memperkuat posisi social politik grup dan pengikutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan pendidikan Islam banyak dipengaruhi oleh para penguasa serta para penguasa memerlukan dukungan instansi Pendidikan buat membenarkan dan mempertahankan kekuasaan. Mengapa demikian, sebab tujuan pemerintahan Islam ialah menegakkan kebenaran serta keadilan dan hal tersebut tidak akan mampu ditegakkan tanpa melaksanakan syariat. Sedang syariat tidak dapat ditegakkan tanpa umat yang paham Ihwalsyariat.

Kata Kunci: Relasi Pendidikan Islam Dan Politik, Relasi politik dan Kekuasaan, Relasi Pendidikan Politik Kekuasaan

Copyright (c) 2023 Annisa Tusadia, Qolbi Khoiri

Corresponding author: Annisa Tusadia

Email Address: annisatusadia@gmail.com (Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu)

Received 13 January 2023, Accepted 23 January 2023, Published 27 January 2023

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki sumber kekuasaannya sendiri, dan memiliki kewenangan untuk memaksakan prinsip-prinsip pendidikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kewenangan ini mempunyai jangkauan berdasarkan tujuan dan kepentingan orang yang memegangnya dan bersifat mengikat. Sistem pendidikan di Indonesia telah menempuh perjalanan sejarah yang panjang, mulai dari Zaman Kerajaan, Kolonial, Era Kemerdekaan, dan Pasca Reformasi. Menyerang Indonesia selama era Portugis dan Spanyol adalah misionaris yang tujuannya adalah untuk mengubah orang Indonesia menjadi Kristen. Salah satunya adalah Franciscus Xavier, yang masih terkait terutama dengan lembaga atau lembaga pendidikan Katolik di Indonesia dan dianggap sebagai pilar agama Katolik Indonesia. Oleh karena itu, sebuah sekolah agama didirikan pada tahun 1536 M untuk anak-anak

muda Ternate tempat mereka belajar agama Kristen serta membaca, menulis, dan matematika. (Syaharuddin, 2019)

Pendidikan pada masa penjajahan Portugis dan Spanyol pada masa pemukiman Belanda. Pendidikan terorganisir Belanda memiliki tujuan politiknya sendiri, yaitu mengembangkan tenaga kerja dengan upah rendah untuk memungkinkan Belanda mengeksploitasi harta jajahan mereka. Dalam bukunya *History of Fire*, Ahmad Mansyur Surya Negara mengungkapkan hal tersebut. Mansyur melanjutkan dengan menyatakan bahwa pada tahun 1830–1919 M terjadi berbagai tindakan yang sangat merugikan kaum pribumi, terutama mereka yang menganut agama Islam. Tindakan ini termasuk kerja paksa (Daendels 1808 M) dan perpajakan (Raffles 1811-1816 M, 2018).

Pergeseran-pergeseran besar juga kadang terjadi di bidang pendidikan, terutama setelah proklamasi yang menandai kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. Masyarakat adat, khususnya yang beragama Islam, lebih mudah mengakses pendidikan. Hal ini terasa ketika pimpinan dan civitas akademika pesantren mendidik umat dari dalam. Berkorelasi terbalik dengan sistem pendidikan kolonial yang didirikan oleh Belanda dan bahkan Portugis adalah sistem pesantren. Ras dan etnis seharusnya tidak menjadi penghalang untuk menerima pendidikan yang baik, terutama dalam hal belajar tentang Islam. Pendidikan pasca kemerdekaan memang lebih liberal, namun masih ada persoalan penting yang perlu diselesaikan, dan perlu ditata ulang secara bertahap untuk menciptakan sistem yang benar-benar menangkap esensi pendidikan.

Jelas dari gambaran sejarah sistem pendidikan Indonesia di atas bahwa pemerintahan (kekuasaan) dan perluasan serta kemajuan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Simbiosis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara organisme hidup dalam biologi. Tiga jenis simbiosis dibedakan: parasitisme, yang menguntungkan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain, dan timbal balik, yang menguntungkan kedua belah pihak (memberikan keuntungan kepada satu pihak tanpa merugikan pihak lain). Demikian pula, hubungan antara sistem pendidikan (kekuasaan) dan pendidikan dapat dikategorikan sebagai mutualisme, komensalisme, atau bahkan parasitisme. Oleh karena itu, hubungan antara politik kekuasaan dan pendidikan Islam akan dibahas dalam artikel ini. Selain itu, akan diulas berbagai penjelasan tentang pentingnya pendidikan agama Islam serta kondisi pendidikan agama Islam di Indonesia saat ini. Tetapi sebelum kita melakukan apa pun, perlu diingat bahwa orang bisa salah dan rentan terhadap amnesia. Artikel ini mungkin memiliki masalah tipografi atau lainnya, oleh karena itu kami selalu menerima masukan dan ide yang membangun untuk perbaikan. (Suparlan Dan Utama, 2020)

METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan. Mestika Zed mengatakan bahwa penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca karya yang dikaitkan dengan masalah yang akan dibahas dan menandai bagian-bagian penting yang berhubungan dengan topik pembahasan. Moh. Nazir juga mengatakan bahwa penelitian kepustakaan

adalah suatu proses yang dilakukan dengan menganalisis buku, jurnal, dan referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahasyaitu, mengumpulkan data ataudokumen yang menyangkutrelasi Pendidikan Islam, politik, dan kekuasaan yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau menelaah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Teknik analisis data diawali dengan mengumpulkan referensi yang dihubungkan dengan relasi pendidikan Islam, politik, dan kekuasaan, kemudian dievaluasi dan dipelajari untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis. Hasil analisis yang diperoleh sesuai dengan judul yang diberikan oleh penulis.

HASIL DAN DISKUSI

Pendidikan Islam, Politik, dan Kekuasaan

1. Pengertian Pendidikan Islam, Politik, dan Kekuasaan

Menurut kutipan M. Arifin dari Prof. Omar Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani, pendidikan Islam mengandung upaya mengubah perilaku peserta didik dalam lingkup pribadi, sosial, dan lingkungannya.

Politik didefinisikan sebagai studi tentang memperoleh kekuasaan. Itu juga bisa merujuk pada pengetahuan tentang administrasi negara, semua masalah dan tindakan yang melibatkan kebijakan strategis, dll., Yang berkaitan dengan pemerintahan suatu negara atau hubungannya dengan negara lain. Menurut etimologinya, kata “kekuasaan” mengacu pada kapasitas untuk melakukan suatu tindakan serta kewenangan untuk mengambil, menguasai, dan mewakili berbagai hal. Sebaliknya, kekuasaan didefinisikan sebagai otoritas seseorang atau organisasi yang memiliki kapasitas untuk berbicara, mengendalikan, mengelola, atau mengatur sesuatu. (Khoiruddin Bashori,2018)

Dalam masyarakat kontemporer, subjek kekuasaan sangat menarik. Orang berada di bawah kendali berbagai kekuatan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kekuatan politik, ekonomi, dan militer. Masyarakat memberikan perhatian khusus pada kekuasaan politik daripada bentuk-bentuk kekuasaan lainnya. Selain itu, otoritas politik membutuhkan sumber untuk mendukungnya. Senjata, penjara, kerja paksa, teknologi, pendidikan, sistem pengikatan, dan aparatus adalah beberapa contoh sumber kekuatan yang diharapkan berbentuk alat koersif. (Rashda Diana, 2018) Pemerintah dapat melemahkan segala bentuk penentang kekuasaan dengan menggunakan alat dan sumber daya tersebut, termasuk pendidikan, yang juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.

2. Hubungan Politik dengan Pendidikan

Setiap bangsa memiliki sistem sosial-politik, dan dua komponen kunci adalah politik dan pendidikan. Meski diposisikan sebagai dua komponen krusial dalam sistem sosial-politik, politik dan pendidikan seringkali dicermati secara terpisah. Ini jelas tidak benar karena politik dan pendidikan berjalan beriringan dalam pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan.

Ungkapan tersebut di atas membuktikan hubungan yang tampak kuat antara politik dan pendidikan dalam Islam. Para penguasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kegiatan

pendidikan, dan mereka bergantung pada lembaga pendidikan untuk mendukung mereka dalam mempertahankan dan mempertahankan posisi otoritas mereka. Ini masuk akal mengingat misi pemerintah Islam adalah "menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan". Syariat harus diikuti untuk mencapai tujuan itu. Jika masyarakat tidak memahami doktrin Islam, syariat tidak akan berfungsi. Islam sangat mendukung upaya pendidikan pada tingkat agama, tetapi juga karena misi politik yang signifikan yang dilayani oleh lembaga pendidikan, para pemimpin Islam sangat memperhatikan masalah pendidikan.

3. Hubungan Pendidikan Islam dengan Kekuasaan

Pendidikan Islam awal berlangsung di masjid, terutama ketika Nabi dan para sahabat masih hidup. Menurut Ahmad Amin, sejarawan Islam masa itu, pusat pendidikan Islam berada di Hijaz, berpusat di Makkah dan Madinah, sedangkan Irak berpusat di Basra serta Kufah dan Damaskus. Perwakilan dari masing-masing daerah adalah teman yang terkenal. Pendidikan Islam dipusatkan di Bagdad di Bait al-nasehat sepanjang zaman Abbasiyah, Zaman Keemasan Islam. Sementara itu, Abdurrahman III, juga dikenal sebagai Al-Dahil, memimpin pemerintahan Islam di Spanyol, yang berpusat di Universitas Kordoba. berdasarkan Universitas al-Azhar di Mesir, yang didirikan oleh dinasti Fathimiyah Syiah. (Fatkhur Rokhzi, 2018)

Baik negara Muslim maupun non-Muslim sekarang sedang membangun sistem pendidikan Islam mereka. Studi Islam dilakukan di UIN, IAIN, dan STAIN di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi swasta seperti Unissula (Semarang) dan Unisba menyelenggarakan pendidikan Islam (Bandung).

Hal ini memungkinkan komponen pendidikan Islam untuk dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk sumber Islam, ideologi Islam, ritual Islam dan lembaga, sejarah Islam, sekolah pemikiran dan individu, studi lokasi, dan bahasa. Empat era pertumbuhan politik Indonesia dan dampak kebijakan politik pemerintah terhadap kemajuan pendidikan Islam (Pra kemerdekaan, orde lama, orde baru dan orde reformasi). Jelas, baik secara langsung maupun tidak langsung, kecerdasan politik para pemimpin di masanya berdampak besar pada bagaimana pendidikan Islam berkembang. (Abdul Mujib, 2018)

4. Relasi Politik, Kekuasaan dan Pendidikan

Sesuai dengan kekhasan lingkungan sosial politik di mana intimidasi terjadi, Sirozi menggarisbawahi bahwa interaksi antara politik kekuasaan dan pendidikan memiliki beberapa bentuk. Dari satu masyarakat ke masyarakat berikutnya, saling ketergantungan ini mengambil bentuk yang berbeda. Hubungan ini dapat berbentuk interaksi komunitas ke komunitas. Koneksi ini mungkin lemah dan diremehkan di satu masyarakat sementara sangat asli dan kuat di masyarakat lain. Menurut pola yang dibentuk oleh otoritas yang ada, pola keterkaitan antara pendidikan dan kekuatan politik di negara berkembang berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

a. Domestifikasi dan Stupidifikasi

Proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah menunjuk pada persoalan domestikasi (domestikasi). Proses pendidikan berjalan seiring dengan arahan yang datang dari penguasa yang dikeluarkan dengan maksud menjinakkan orang liar untuk tunduk dan patuh kepada orang tuanya, oleh karena itu kata ini sangat tepat menggambarkan realitas saat ini. Bagaimana bisa? Guru dan siswa tidak berbeda dengan menggunakan mesin robot yang diprogram sedemikian rupa untuk mengikuti penciptanya karena peraturan yang mengikat proses pendidikan tanpa fleksibilitas untuk menjalankan peraturan tersebut, yang dapat mematikan kreativitas dan menyebabkan masalah lain yang dikenal dengan kebodohan (bodoh). pembodohan). pembodohan).

Siswa yang berpartisipasi dalam proses pembelajaran seperti itu dihadapkan pada penggunaan kekuatan yang tidak terkait dengan pendidikan, yang menjadikan mereka budak dan alat kekuasaan dari dominasi mental asli. Mirip dengan keadaan pendidikan saat ini, satu-satunya hal yang membedakan mereka adalah asal kolonial mereka. (Baharudin, 2020)

Perspektif dogmatis tentang pendidikan domestikasi ada, dan itu mengangkat derajat. Diploma adalah penyakit di negara berkembang; tanpa mereka, seluruh perselisihan tidak dapat diselesaikan. Ijazah digunakan untuk menilai dan mengukur kualitas seseorang. Tidak ada bedanya apakah ijazah diperoleh melalui metode yang sah atau dibeli dari lembaga yang tidak dapat diandalkan. Forum-forum Islam yang sebelumnya mulai menyelaraskan dan meninggalkan doktrinnya, juga terpengaruh oleh proses pengajaran.

b. Indoktrinasi

Dalam arti mereka berorientasi pada advokasi sedangkan kekuatan lain berorientasi pada legitimasi, proses pendidikan mengakui kekuatan. Model asli indoktrinasi yang muncul saat ini tampaknya merupakan kurikulum yang mengikat, tetapi indoktrinasi juga dapat terjadi melalui mediator yang tidak terduga di luar sekolah. Bagaimana kurikulum sekolah di Indonesia dikembangkan dari waktu ke waktu menunjukkan seberapa dalam struktur kekuasaan telah tertanam dalam kurikulum, membentuk isinya sesuai dengan sistem politik.

c. Demokrasi Pendidikan

Saat membahas demokrasi pendidikan, kita juga harus membahas kebebasan di kelas. Kata “bebas” yang dimaksud mengacu pada kebebasan dengan pilihan yang tersedia. Meski belum sepenuhnya dilaksanakan, demokrasi pendidikan telah berjalan di Indonesia. Amandemen yang berkaitan dengan budaya dan pendidikan membuat hal ini cukup jelas. Dimana 20% dari anggaran dialokasikan oleh pemerintah untuk kepentingan pendidikan. Namun, seperti yang dikemukakan pembicara sebelumnya, demokrasi pendidikan masih dilaksanakan, dan anggaran berasal dari cara ini terlepas dari apakah sektor yang dianggarkan benar-benar menerimanya atau tidak. Apakah pendidikan Islam mendapat keistimewaan yang sama dengan bentuk pendidikan lainnya, atau apakah sekolah yang dikelola negara adalah satu-satunya bentuk pendidikan yang diperbolehkan dalam realitas saat ini.

d. Integrasi social

Berlawanan dengan kepercayaan populer, integrasi sosial tidak harus dihasilkan dari tindakan mereka yang berada dalam posisi otoritas. Pendidikan yang berkualitas terkadang dapat menimbulkan integrasi sosial. Bahkan H.A.R. Tilaar mencatat bahwa kekuasaan tidak dapat digunakan untuk memaksakan integrasi sosial. Karena pemaksaan kesatuan sosial yang dijalin oleh penguasa akan menghapuskan budaya-budaya lokal, yang berakibat pada terhapusnya kehidupan yang majemuk. (Ibnu Hizam, 2020)

Politik dalam Reformasi Pendidikan Islam di Indonesia

1. Pola Pendidikan Islam di Indonesia

Martin berpendapat bahwa pendirian pendidikan di berbagai majelis, seperti tempat pertemuan rakyat dan surau, baru terjadi setelah masuknya ajaran Islam ke Indonesia (masjid). Selain itu, mulai bermunculan lembaga-lembaga pendidikan yang mewajibkan siswanya untuk bertempat tinggal di suatu lokasi agar mereka dapat belajar dari guru secara lebih efektif. Lembaga yang dikenal dengan pesantren ini merupakan bentuk pendidikan kedua setelah surau, meskipun istilah pesantren belum banyak digunakan pada saat itu.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia. Sejak era penyiaran Islam, pesantren telah berkembang dan berkembang sebagai tempat pendidikan Islam tertua di Indonesia, dan telah melakukan berbagai peran dalam mencerdaskan penduduk negeri ini. Sejarah tumbuhnya pesantren menunjukkan bahwa lembaga ini masih eksis dan konsisten menjalankan perannya sebagai pusat kajian ilmu-ilmu agama Islam, sehingga melahirkan kader-kader ulama, tokoh agama, mubaligh, dan lain-lain yang diharapkan. oleh tokoh setempat. Tujuan khusus pada awalnya digunakan untuk menetapkan sejarah berdirinya pesantren, yaitu:

- a. *Pertama*, sebagai wahana kaderisasi ulama yang nantinya diharapkan mampu menyebarkan ajaran agama di tengah masyarakat.
- b. *Kedua*, membentuk jiwa dan pribadi santri yang memiliki kualifikasi moral dan religius.
- c. *Ketiga*, menanamkan kesadaran holistic bahwa belajar adalah kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan, bukan hanya untuk meraih prestasi kehidupan didunia. (Ibnu Hizam, 2019)

Pendidik seringkali mengabaikan komponen politik pendidikan Islam sebagai salah satu komponen terpentingnya. Komponen ini menjelaskan hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta antara bangsa, organisasi, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat hubungan kuat yang menantang untuk diurai antara pendidikan Islam dan politik. Matinya madrasah di Indonesia merupakan akibat dari proses modernisasi surau yang cenderung menimbulkan perebutan antara lembaga pendidikan tradisional dan kontemporer. Ki Hajar Dewantara memahami, bagaimanapun, bahwa fungsi ulama telah mengarah pada pengembangan sistem spiritual serta sosial dan budaya politik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya lulusan pesantren yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi bergengsi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selain itu, masih banyak jenis pendidikan Islam lainnya di Indonesia yang masing-masing memiliki ciri khas terkait dengan lembaga yang mengembangkannya. Terciptanya pribadi-pribadi formal dan informal dengan ideologi politik yang berbedayang dianggap lebih modernis, fundamentalis, konservatif, dan nasionalis adalah akibat dari keragaman orientasi pendidikan. Pengaruh lembaga pendidikan relatif besar dalam membentuk watak dan kepribadian seseorang agar memiliki kerangka berpikir yang tidak sinkron, padahal faktor lain seperti lingkungan sosial budaya dan kemampuan berpikir juga berdampak pada perilaku politik seorang tokoh.

KESIMPULAN

Politik kekuasaan adalah bagaimana negara menjalankan kekuasaannya. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah membutuhkan berbagai komponen, salah satunya adalah warga negara yang berguna yang dapat menjalankan mesin pemerintahan secara efisien. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan orang-orang yang cerdas dan mampu menjalankan mesin pemerintahan selain melalui pendidikan rakyat. Namun dalam praktiknya, mereka yang tidak bertanggung jawab untuk mempertahankan otoritasnya aktif menyalahgunakan proses pendidikan.

Cara terbaik untuk mencapai hal ini adalah dengan menciptakan sistem atau kebijakan yang, jika dicermati lebih dekat, memasukkan kebijakan yang menjunjung tinggi dan melindungi otoritas mereka. Pendidikan Islam, bagaimanapun, adalah sekolah gaya lama. Namun, ajaran gagasan yang kemudian dinilai sebagai hasil dipraktikkan dan menjadi falsafah negaralah yang melahirkan pendidikan Islam, bukan asal-usul kekuasaan. Pendidikan Islam terus bergoyang. Meminta persetujuan dari pihak berwenang diperlukan saat membuka sekolah berasrama atau jenis institusi lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam dan politik kekuasaan tidak dapat dipisahkan karena saling ketergantungan satu sama lain.

REFERENSI

- Abdul Mujib, Yuyun Yunita, 2018, *Pendidikan Islam Dan Politik*, Jurnal Ri"ayah, Vol. 03, No. 01.
<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php>
- Ahmad, *Relasi Politik Dengan Implementasi Pendidikan Islam*, Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman, Vol.4, No. 2. <https://www.journal.uim.ac.id>
- Baharudin Dan H. Ibnu Hizam, 2022, *Peran Kekuasaan Dalam Pendidikan*, Volume 13, No. 1.
<https://journal.uinmataram.ac.id>
- Dian Fitriana, Dkk, 2020, *Hakikat Dasar Pendidikan Islam*, Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 2. <https://doi.org/10.32923/Tarbawy.V7i2.1322>
- Fauziah Nasution, 2020, *Kedatangan Dan Perkembangan Islam Di Indonesia*, Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol. 11, No. 1.
<https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php>

- GustiIrhamnaHusin, 2017, *Pemikiran Tentang Sistem Dan Kelembagaan Pendidikan Islam Di Masa Rasulullah Pada Periode Makkah Dan Periode Madinah*, Jurnal Ilmiah Al Qalam, Vol. 11, No. 24.
<https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/11/11>
- HarisMonoarfa, Dkk, 2022, *Intervensi Politik Dalam Dunia Manajemen Pendidikan Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Dan Konseling Volume 4 Nomor 5.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id>
- Iman Amanda Permatasari, 2020, *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*, Volume 1 Nomor 1 Maret. <http://thejournalish.com>
- KhoiruddinBashori, 2018, *Pendidikan Politik Di Era Disrupsi*, Jurnal Pendidikan, Vol 2 Issue 2.
<https://www.jurnalsukma.org/index.php/sukma/article/view/02207.2018/40>
- Made Sugiarta, Dkk, 2019, *Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara (Tokoh Timur)*, Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 2 No 3 Tahun 2019.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jfi/article/view/22187>
- Mokh. FatkhurRokhzi, 2015, *Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam*, Jurnal Hikmah, Vol. Iii, No. 1.
<http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id>
- Muhammad Sya'roni, 2019, *Internalisasi Budaya Pesantren Pada Kurikulum Sekolah*, Jurnal Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam, Vol 11, No. 02.
<http://journal.stitaf.ac.id/index>.
- Nadziroh, Dkk, 2018, *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Ke-Sd-An, Vol. 4, Nomor 3. <https://media.neliti.com>
- NdaruKukuhMasgumelar, PintonSetya Mustafa, 2021, *Teori Belajar Konstruktivisme Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Dan Pembelajaran*, Ghaitsa: Islamic Education Journal Vol (2) Issue (1) 2021.
<https://www.siducat.org/index.php/ghaitsa/article/view/188/155>
- NofalLiata, 2020, *Relasi Pertukaran Sosial Antara Masyarakat Dan Partai Politik*, Jurnal Sosiologi Agama Indonesia, Vol. 1, No. 1, Maret 2020, <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jsai/article/view/483/303>
- Okrisal Eka Putra, 2016, *Ulama Sebagai Penyeimbang Kekuatan Sosial Politik Di Indonesia*, Jurnal Tarjih - Volume 13 Nomor 1.
<https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/13105/6>
- Rashda Diana, 2018, *Etika Politik dalam Perspektif al-Mawardi*, Jurnal peradaban Islam, Volume 14, Number 2. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id>
- RofikAksan, 2022, *Kekuasaan Dan Politik Lembaga Pendidikan Islam*, Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah, Volume 10 No 1 Tahun 2022.

- SigitPriatmoko, 2018, *MemperkuatEksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0*, Ta'Lim: JurnalStudi Pendidikan Islam, Vol.1 No.2. [Http://Www.E-Jurnal.Unisda.Ac.Id](http://www.E-Jurnal.Unisda.Ac.Id)
- Suparlan Dan Utama, 2020, *ArahPolitik Pendidikan Islam Di Masa Disrupsi*, Jurnal Kajian, Penelitian Dan PengembanganKependidikan, Vol. 11, No. 3, September 2020. [Https://Journal.Ummat.Ac.Id/Index](https://Journal.Ummat.Ac.Id/Index)